

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Rendahnya mutu pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah tidak saja dikeluhkan oleh masyarakat, orang tua siswa, tetapi dikeluhkan juga oleh guru-guru pada semua jenjang pendidikan, yang setiap harinya bersama-sama dengan siswa melakukan kegiatan pembelajaran. Rendahnya mutu pendidikan yang dicerminkan dari nilai ujian akhir sekolah maupun nasional, ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurikulum, ketenagaan (profesionalitas guru), sarana dan prasarana, manajemen sekolah, dan peran serta masyarakat. Terlebih lagi sekarang ini terdapat tuntutan aktivitas pada kurikulum berbasis kompetensi lebih banyak, dalam menguasai kompetensi tertentu untuk setiap pokok bahasannya (Puskur, Balitbang Depdiknas, 2002). Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan bila banyak tuntutan yang dialamatkan kepada sistem pendidikan untuk terus mengadakan perubahan kurikulum guna lebih mendekati sistem dengan tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan tuntutan globalisasi.

Permasalahan peningkatan mutu pendidikan merupakan kondisi yang penting dan mendesak untuk dipikirkan oleh stakeholder pendidikan. Secara sistemik, diperlukan perbaikan kurikulum yang semakin mendekati pada ketercapaian

tujuan pendidikan nasional. Pembaharuan kurikulum di Indonesia diawali dengan pembaharuan kurikulum 1968 menjadi kurikulum 1975, kemudian diperbaharui lagi menjadi kurikulum 1984. dilanjutkan lagi menjadi kurikulum 1994, dan dewasa ini menjadi kurikulum 2004 dengan wawasan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dicanangkan sejak tahun 2003, dan selanjutnya kurikulum ini disempurnakan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2007. Dengan harapan mutu pendidikan dasar dan menengah akan meningkat yang tercermin dari nilai ujian akhir sekolah maupun nasional, dan pada akhirnya akan meningkatkan pula mutu anak didik Indonesia.

Dunia pendidikan harus mampu menghasilkan SDM berkualitas dan profesional. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang mampu berpikir global (*think globally*), dan mampu bertindak lokal (*act locally*), serta dilandasi oleh akhlak yang mulia (*akhlakul karimah*). Dalam hal ini, kualitas pendidikan di pengaruhi oleh penyempurnaan sistemik terhadap seluruh komponen pendidikan seperti peningkatan kualitas dan pemerataan penyebaran guru, kurikulum yang disempurnakan, sumber belajar, sarana dan prasarana yang memadai, iklim pembelajaran yang kondusif, serta didukung oleh kebijakan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai reformasi dalam bidang pendidikan. Dan sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan sebuah kurikulum. Menurut Sukmadinata (2008), “Kurikulum (*curriculum*) merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar”.

Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum memiliki empat komponen, yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi pencapaian tujuan dan komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum pun akan terganggu pula.

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum mencerminkan falsafah hidup bangsa, ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan itu kelak akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan oleh bangsa tersebut sekarang. Nilai sosial, kebutuhan dan tuntutan masyarakat cenderung/selalu mengalami perubahan antara lain akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum harus dapat mengantisipasi perubahan tersebut, sebab pendidikan adalah cara yang dianggap paling strategis untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.

Kurikulum bukanlah barang mati dan juga bukan kitab suci yang sakral dan tidak boleh diubah-ubah. Kurikulum disusun agar dunia pendidikan dapat memenuhi tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Jika masyarakatnya berubah, maka kurikulumnya juga ikut berubah. Jika kurikulum tidak berubah, maka sebuah layanan pendidikan hanya akan menghasilkan produk didik yang mandul, yang

pada akhirnya akan ditinggalkan oleh masyarakat sebagai salah satu stakeholder pendidikan.

Kurikulum dapat (paling tidak sedikit) meramalkan hasil pendidikan/pengajaran yang diharapkan karena ia menunjukkan apa yang harus dipelajari dan kegiatan apa yang harus dialami oleh peserta didik. Hasil pendidikan kadang-kadang tidak dapat diketahui dengan segera atau setelah peserta didik menyelesaikan suatu program pendidikan. Pembaharuan kurikulum perlu dilakukan sebab tidak ada satu kurikulum yang sesuai dengan sepanjang masa, kurikulum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang senantiasa cenderung berubah.

Pada tahun 2007 merupakan suatu era baru dalam dunia pendidikan Indonesia ketika kurikulum suplemen 1999 dirubah menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 2003 dan disempurnakan menjadi KTSP pada tahun 2007. Kepala Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Siskandar menyatakan bahwa penerapan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) menuntut kualitas guru memadai sehingga perlu meng-*upgrade* kemampuan guru supaya pelaksanaan kurikulum sesuai dengan harapan.

Pada Kurikulum Berbasis Kompetensi pelaksanaan evaluasi dilaksanakan per kompetensi dasar, hal ini memicu penguasaan materi secara maksimal karena diterapkan kriteria ketuntasan belajar disetiap kompetensi dasarnya. Bila siswa belum mencapai nilai yang sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Belajar (KKM) maka siswa diwajibkan mengulang (remedial) pada kompetensi dasar tersebut

sampai mencapai kriteria ketuntasan belajar tersebut. Hal ini tentu saja semakin menuntut profesionalisme guru dalam memahami konsep KBK itu sendiri.

Menurut kementerian pendidikan nasional terlaksananya kurikulum KTSP ternyata pada saat ini belum memenuhi kebutuhan untuk pencapaian tujuan pendidikan di era ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Oleh karena itu kementerian yang dipimpin oleh M. Nuh ini menggagas perubahan kurikulum dari kurikulum berbasis kompetensi ke kurikulum 2013. Dari hasil bahan uji publik Depdikbud kurikulum 2013 untuk merealisasikan kurikulum 2013, kesenjangan yang mendasar terjadinya perubahan kurikulum dari kurikulum berbasis kompetensi ke kurikulum 2013 diantaranya:

- a) aspek kompetensi lulusan yang menyatakan belum sepenuhnya menekankan pendidikan karakter; belum menghasilkan ketrampilan sesuai kebutuhan; pengetahuan-pengetahuan lepas,
- b) aspek materi pelajaran yang meliputi: belum relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan; beban belajar terlalu berat; terlalu luas kurang mendalam,
- c) aspek proses pembelajaran meliputi: berpusat pada guru; sifat pembelajaran yang berorientasi pada buku teks; buku teks hanya memuat materi bahasan,
- d) aspek penilaian,
- e) aspek pendidik dan tenaga kependidikan,
- f) pengelolaan kurikulum.

Pengembangan Kurikulum 2013 membutuhkan kesiapan bukan saja dari sekolah, melainkan dukungan dari berbagai pihak, baik orangtua, birokrasi, masyarakat, dan yang paling utama adalah guru sebagai ujung tombak pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum 2013 harus ditangani secara profesional dengan tingkat pemahaman yang baik dalam bidang pendidikan.

Sekolah dituntut untuk profesional dalam menangani segala persoalan pendidikan. Jangan sampai sebagai pelaksana pendidikan, sekolah justru tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Hal penting untuk segera dilakukan adalah bagaimana menyiapkan sekolah-sekolah agar siap mentransfer perubahan melalui peranannya sebagai pengembang kurikulum yang baru.

Berdasarkan kondisi tersebut perlu diteliti kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan KTSP. Namun pada kenyataannya diberbagai daerah pengembangan kurikulum 2013 dianggap terlalu cepat dan buru-buru. Hal ini tentu saja merepotkan guru sebagai pelaksana pendidikan untuk beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Belum sempat diketahui dampak kurikulum yang lama suda berganti lagi dengan kurikulum yang baru.

Perubahan kurikulum 2013 ini pada nyatanya juga mengundang kontroversi beberapa sekolah terutama sekolah yang berada didaerah yang rata-rata minim fasilitas dan dengan SDM guru dan siswa yang dibawah rata-rata. SMA Negeri 1 Sekampung merupakan salah satunya, sekolah yang berada di kabupaten Lampung Timur yang letaknya di pedesaan tepatnya di desa Margatiga kecamatan Sekampung ini termasuk salah satu sekolah yang kewalahan menghadapi kurikulum yang terus menerus berganti. Guru di SMA Negeri 1 Sekampung

menjadi sulit dalam menerapkan orientasi pembelajaran bagi siswanya. Perubahan kurikulum hendaknya harus direncanakan, diantisipasi dan disosialisasikan jauh-jauh hari bukan seperti kejar-kejaran seperti ini. Namun, disisi lain guru juga menilai kurikulum KTSP banyak sekali kelemahan. Berikut disajikan beberapa kelemahan kurikulum KTSP menurut para guru di SMAN 1 Sekampung:

Tabel 1.1. Permasalahan Kurikulum KTSP Menurut Para Guru di SMAN 1 Sekampung

No	Indikator	Permasalahan
1	Kompetensi Lulusan	belum sepenuhnya menekankan pendidikan karakter; belum menghasilkan ketrampilan sesuai kebutuhan; pengetahuan-pengetahuan lepas.
2	Materi Pelajaran	Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan <i>soft skills</i> dan <i>hard skills</i> , kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum.
3	Proses Pembelajaran	Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru.
4	Aspek Penilaian	Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (sikap, keterampilan, dan pengetahuan) dan belum tegas, menuntut adanya remediasi secara berkala.
5	Aspek Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global.
6	Pengelolaan Kurikulum	Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak.

Sumber: Analisis data observasi pra-penelitian

Guru SMA Negeri 1 Sekampung sebagai pemangku kegiatan belajar mengajar di sekolah adalah salah satu komponen pendidikan yang merasakan dampak paling besar terhadap aneka macam perubahan kurikulum. Hal ini dapat dimengerti dari

background lokasi dan keadaan lingkungan serta fasilitas pendidikan yang kurang memadai dibandingkan dengan sekolah lain di kota. Selain itu, kebanyakan guru SMA bukanlah konseptor yang mampu menerjemahkan keinginan kurikulum ke dalam muatan pengajaran praktis sesuai keinginan kurikulum 2013.

Fenomena perubahan kurikulum ini tentu mengganggu kestabilan pembelajaran di sekolah tergantung pada peranan guru dalam mengelola kurikulum. Peranan penting guru dalam sistem pendidikan ditunjukkan oleh peranannya sebagai pihak yang harus mengorganisasi atau mengelola elemen-elemen kurikulum, sistem penyajian bahan pelajaran, sistem administrasi, dan sistem evaluasi. Dari berbagai peranan itu, nyata sekali bahwa gurulah pihak yang paling bertanggung jawab bagi keefektifan KBM di kelas sebagai akibat pergantian kurikulum yang akan terjadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti ingin mengadakan penelitian tentang persepsi guru di SMA Negeri 1 Sekampung dalam kaitannya dengan rencana pelaksanaan kurikulum 2013 yang hendak dilaksanakan pemerintah. Dengan penelitian ini diharapkan peneliti mampu menganalisis kesiapan guru dalam menghadapi perubahan kurikulum 2013, serta hasilnya dapat dijadikan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurikulum KTSP dianggap pemerintah sudah tidak layak lagi untuk menghadapi tantangan globalisasi.

2. Perubahan kurikulum 2013 terkesan tergesa-gesa mengingat kurikulum sebelumnya belum diketahui hasilnya
3. Sekolah-sekolah yang berada di daerah sulit menerima perubahan kurikulum mengingat SDM guru dan siswanya tergolong masih dibawah rata-rata
4. Guru di SMA Negeri 1 Sekampung sulit menentukan orientasi pembelajaran dengan diadakannya pergantian kurikulum

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang diidentifikasi, penulis membatasi masalah penelitian ini yaitu persepsi guru di SMA Negeri 1 Sekampung dalam kaitannya dengan rencana pelaksanaan kurikulum 2013.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut “Bagaimanakah persepsi guru di SMA Negeri 1 Sekampung dalam kaitannya dengan rencana pelaksanaan kurikulum 2013?”

1.5. Tujuan dan Manfaat

1.5.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesiapan guru SMA Negeri 1 Sekampung dalam menghadapi pergantian kurikulum 2013.

1.5.2. Manfaat Penelitian

1.5.2.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritik penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan konsep kurikulum pendidikan khususnya untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.5.2.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat secara praktis untuk :

1. Bagi pemerintah daerah adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas profesionalisme guru mata pelajaran di SMA Negeri melalui pelatihan-pelatihan/ *In House Training* dalam rangka menghadapi perubahan kurikulum 2013.
2. Bagi guru adalah :
 - a. Meningkatkan kesiapan guru khususnya di SMA Negeri 1 Sekampung dalam menghadapi kurikulum 2013
 - b. Memberikan aspirasinya terkait perubahan kurikulum yang akan dilaksanakan

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

1.6.1. Ruang Lingkup Objek

Objek penelitian ini adalah rencana pelaksanaan kurikulum 2013.

1.6.2. Ruang Lingkup Subjek

Subjek penelitian ini adalah para guru di SMA Negeri 1 Sekampung.

1.6.3. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sekampung.

1.6.4. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2012/2013.